

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2024

KECAMATAN SUKATANI



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

KECAMATAN SUKATANI

Jalan Raya Cilalawi KM. 12 Sukatani-Purwakarta 41167



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

**RENCANA KERJA
TAHUN 2024**

**KECAMATAN SUKATANI
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan sehingga Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukatani Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2024 ini merupakan amanat Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta menjadi dokumen acuan bagi Kecamatan Sukatani dalam melaksanakan kegiatan guna pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Dokumen ini berisi indikator kinerja, program dan kegiatan, target capaian kinerja renstra, realisasi target kinerja program dan kegiatan, target kinerja renja serta indikator kinerja program.

Akhirnya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukatani Tahun 2024 dapat terwujud. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat dan hidayah atas setiap usaha kita bersama.

Sukatani, 27 Juli 2023

CAMAT SUKATANI



HASANUDIN, S.Pd., KP

NIP. 19660304 199103 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR LAMPIRAN iv

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sukatani 10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 25

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Kecamatan Sukatani..... 27

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 30

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 36

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 43

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024..... 48

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024..... 50

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 57

BAB V : PENUTUP 67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Target Dan Realisasi Keuangan Tahun Anggran.....	11
Tabel T-C. 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)	15
Tabel T-E. 1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	22
Tabel 2.2	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kecamatan Sukatani Tahun 2022	23
Tabel T-C. 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta	26
Tabel T-C. 31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Purwakarta	32
Tabel T-C. 32	Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta	37
Tabel 3.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja.....	49
Tabel T-C. 33	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta.....	53
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja Dan Pagu Indikatif Tahun 2024	60
Tabel 4.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Pagu Indikatif Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Camat Sukatani Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2024
2. Rencana Program Kerja Pada Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukatani dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan, maka Pemerintah Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta berkewajiban menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Kecamatan Kabupaten Purwakarta dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

Rencana pembangunan Kecamatan Sukatani dimaksud diawali dari Rencana Rencana strategis (RENSTRA) untuk pembangunan 3 (Tiga) tahun kedepan (2024-2026) dan Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Kecamatan Sukatani untuk pembangunan tahunan.

Penyusunan Renja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 mempedomani dokumen Renstra Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Hal ini dikarenakan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta dan periode RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 berakhir pada tahun 2023, sehingga penyusunan dokumen Renja Tahun 2024 mempedomani dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024- 2026 tersebut, sebagai transisi masa kepemimpinan Kepala Daerah yang akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukatani Tahun 2024-2026 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dokumen Rencana Kerja tahunan (RENJA) selama 3 (tiga) tahun, mulai tahun 2024 – 2026.

Rencana Strategis Kecamatan Sukatani Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, yakni Tahap Keempat RPJPD. Sedangkan Renja

merupakan penjabaran pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tahunan yang berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukatani Tahun 2024 mengakomodir semua kebutuhan pembiayaan operasional pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan pada masing-masing perangkat kecamatan, yang disesuaikan dengan kemampuan riil anggaran keuangan setiap Program, Kegiatan dan Subkegiatan Pemerintahan Kecamatan Sukatani dan regulasi kebijakan Pimpinan yang harus dilaksanakan.

Selain itu Renja juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan Renja Kecamatan Sukatani Tahun 2024 ini difokuskan pada Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yaitu **Visi : “ PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”** , dengan **Misi : “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat “** , mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan akuntabel di wilayah kecamatan, meningkatnya akuntabilitas publik penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja kecamatan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa serta penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, meningkatkan soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat, meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan Renja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dilakukan melalui serangkaian tahapan yaitu :

1. Persiapan Penyusunan Renja;

2. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renja;
3. Pelaksanaan Konsultasi Publik;
4. Penyusunan Rancangan Renja;
5. Pelaksanaan Musrenbang;
6. Penyempurnaan Penyusunan Renja ; dan
7. Penetapan Rencana Kerja (Renja).

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

33. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024- 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor);
34. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
35. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35);
36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan.
39. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.
40. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
41. Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor PR.02.01/4306/Bappelitbangda/2022 tentang Jadwal dan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Menjadi pedoman bagi Kecamatan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja);
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
6. Menjadi acuan dalam penyusunan laporan capaian kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sukatani , dan penyusunan laporan lainnya;

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

2. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel T-C.29)

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T- C.30)
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel T-C.31)
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel T-C.32)

3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan (Tabel T-C.33)

4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengemukakan rencana kerja program kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam table matrik

5. BAB V TUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN SUKATANI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sukatani

Kecamatan Sukatani telah mengevaluasi kinerja tahun 2022, bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2022.

Kinerja Kecamatan Sukatani tahun 2022 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pada tahun 2022 anggaran murni mempunyai 5 Program, 10 kegiatan dan 23 Subkegiatan dengan jumlah anggaran murni sebesar **Rp. 4.171.535.575,-** dan dana sebesar itu diarahkan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.489.474.026,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 652.093.100,-. Dalam pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau belum mencapai target hanya terserap **83,87%** dan ini sangat berpengaruh pada capaian kerja Kecamatan Sukatani Tahun Anggaran 2022.

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan di atas dapat dilihat pada table 2.1 di bawah ini:

Tabel. 2.1

EVALUASI TARGET DAN REALISASI KEUANGAN ANGGARAN TAHUN 2022

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN SUKATANI

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
0.00 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 1.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.200.000,00	0,00	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	95,63	140.000,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.677.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	98,35	77.000,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.600.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	93,75	100.000,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.595.000,00	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	73,99	675.000,00
	TOTAL KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	12.072.000,00	0,00	11.080.000,00	0,00	11.080.000,00	91,78	992.000,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.489.474.026,00	2.880.341.118,00	0,00	0,00	2.880.341.118,00	82,54	609.132.908,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.516.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	92,08	516.000,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.495.990.026,00	2.880.341.118,00	6.000.000,00	0,00	2.886.341.118,00	82,56	609.648.908,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.433.670,00	0,00	15.433.400,00	0,00	15.433.400,00	100,00	270,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.091.346,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	99,50	91.346,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.299.190,00	0,00	70.800.000,00	0,00	70.800.000,00	92,79	5.499.190,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.742.000,00	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00	98,97	142.000,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.640.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	32,79	9.840.000,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	138.206.206,00	0,00	122.633.400,00	0,00	122.633.400,00	88,73	15.572.806,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.006.690,00	0,00	0,00	29.890.000,00	29.890.000,00	99,61	116.690,00
	TOTAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH	30.006.690,00	0,00	0,00	29.890.000,00	29.890.000,00	99,61	116.690,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
0.00 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	91,67	350.000,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.577.150,00	0,00	29.788.646,00	0,00	29.788.646,00	94,34	1.788.504,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	224.112.310,00	0,00	222.415.044,00	0,00	222.415.044,00	99,24	1.697.266,00
	TOTAL KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG	259.889.460,00	0,00	256.053.690,00	0,00	256.053.690,00	98,52	3.835.770,00
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.200.000,00	0,00	19.719.300,00	0,00	19.719.300,00	85,00	3.480.700,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.214.750,00	0,00	14.800.000,00	0,00	14.800.000,00	97,27	414.750,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73.562.373,00	0,00	73.229.000,00	0,00	73.229.000,00	99,55	333.373,00
	TOTAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.048.141.505,00	2.880.341.118,00	503.515.390,00	29.890.000,00	3.413.746.508,00	84,33	634.394.997,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 2.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
	TOTAL KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	111.977.123,00	0,00	107.748.300,00	0,00	107.748.300,00	96,22	4.228.823,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 2.2.01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39.300.290,00	0,00	26.530.000,00	0,00	26.530.000,00	67,51	12.770.290,00
	TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.300.290,00	0,00	26.530.000,00	0,00	26.530.000,00	67,51	12.770.290,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 3.2.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
	TOTAL KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	39.300.290,00	0,00	26.530.000,00	0,00	26.530.000,00	67,51	12.770.290,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 3.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 3.2.02.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	TOTAL PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 5.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
	TOTAL KEGIATAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
7.01 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 5.2.01.1	Penugasan Kepala Daerah							
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	52.692.960,00	0,00	37.300.000,00	0,00	37.300.000,00	70,79	15.392.960,00
	dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,							
	Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik							
	Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta							
	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan							
	Republik Indonesia							
	TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	52.692.960,00	0,00	37.300.000,00	0,00	37.300.000,00	70,79	15.392.960,00
	PEMERINTAHAN UMUM							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 6.2.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN							
	PEMERINTAHAN DESA							
	TOTAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN	52.692.960,00	0,00	37.300.000,00	0,00	37.300.000,00	70,79	15.392.960,00
	PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA							
	DAERAH							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan							
	Pengawasan Pemerintahan Desa							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 6.2.01.9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	15.729.000,00	0,00	15.710.000,00	0,00	15.710.000,00	99,88	19.000,00
	Dengan Pembangunan Desa							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.35.0.0 . 6.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan	5.671.820,00	0,00	5.543.250,00	0,00	5.543.250,00	97,73	128.570,00
	Perdesaan							
Jumlah		4.171.535.575,00	2.880.341.118,00	588.598.640,00	29.890.000,00	3.498.829.758,00	83,87	672.705.817,00

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang secara spesifik digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator-indikator kinerja ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Adapun Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Sukatani berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023 adalah sebagai disajikan dalam Tabel –TC.29 dibawah ini :

TABEL T.C-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2023(Tahun Berjalan)
Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta

KODE				Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat daerah)Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2021	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat DaerahTahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat DaerahTahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%) 2022		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-) 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)2023
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
Kecamatan													
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Capaian Sakip Perangkat Daerah 2. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB 100%	B 88,24%	BB 100%	B 84,33%	100% 84,33%	BB 100%	BB 284,33%	BB 100%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan Evaluasi kinerja yang disusun	100%	90,63%	100%	91,78%	91,78%	100%	282,41%	100%
7	01	01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daearah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	1 Dokumen	7 Dokumen	100%
7	01	01	2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	98,35%	1 Dokumen	4 Dokumen	100%

7	01	01	2.01.03	Koordinasi Dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
7	01	01	2.01.04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	01	01	2.01.05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-			1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	01	01	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Lapoaran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
7	01	01	2.02.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun								
7	01	01	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	100%	14 Bulan	42 Bulan	100%
7	01	01	2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan	3 Laporan	100%
7	01	01	2.06	Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disusun								
7	01	01	2.06.01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-

				Barang Milik Daerah Pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD								
7	01	01		Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas yang dibuat	-	-	-	-	-		-	-
7	01	01		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengelolaan Penyediaan Administrasi Umum yang dilaksanakan								
7	01	01	2.06.01	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	17 Item	20 Item	17 Item	15 Item	88,24%	15 Item	50 item	100%
7	01	01	2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor	-	9 item	-	-	-	-	9 item	100%
7	01	01	2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	22 item	50 item	22 item	22 item	100%	27 item	99 item	100%
7	01	01	2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan	41 item 660 Dus	41 item 660 Dus	41 item 660 Dus	30 item 660 Dus	73,17%	31 item/Dus	102 item/1.320 Dus	100%
7	01	01	2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 item/Lembar	2 item/lembar	4 item/Lembar	4 item/Lembar	100%	5 item	11 item	100%
7	01	01	2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	140 OH	140 OH	140 OH	85 OH	60,72%	44 OH	269 OH	100%
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang yang di								

				Urusan Pemerintah Daerah	butuhkan								
7	01	01	2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-	-	-	-	-	3 item	3 item	100%
7	01	01	2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Item	-	5 Item	5 Item	100%	8 item	12 item	100%
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dibutuhkan								
7	01	01	2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	420 Lembar	400 Lembar	420 Lembar	385 Lembar	91,67%	12 Laporan/Bulan	785 lembar/12 laporan	100%
7	01	01	2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	100%
7	01	01	2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	9 Orang	9 Orang	9 Orang	9 Orang	100%	9 Orang	27 Orang	100%
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan								
7	01	01	.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	10 Unit 4 Unit	6 Unit	10 Unit 4 Unit	4 Unit 4 Unit	40,00%	9 Unit	19 Unit	100%
7	01	01	2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	9 Item	6 Item	9 Item	9 Item	100%	15 Unit	30 item	100%
7	01	01	2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	1 Unit	7 item	100%
7	01	01	2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunannya yang dipelihara	-	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%

				kantor atau bangunan lainnya									
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	(Baik) 93%	(Baik) 92%	(Baik) 93%	(Baik) 82,64%	88,86%	(Baik) 93%	(Baik) 267,64%	(Baik) 93%
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	02	2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Kegiatan	6 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100%	15 Kegiatan	28 Kegiatan	100%
7	01	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	02	2.01.03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	3.2.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	-	-	100%	-	-	-	-	-
7	01	01	3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	03	2.06.12	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	-	-	100%	-	-	-	-	-

				pembangunan dikelurahan									
7.	01	05		PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi dan Sosialisasi Pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	14,3%	100%	70,79%	70,79%	100%	185,09%	100%
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								
7	01	05	2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI	100%	14,3%	100%	70,79%	70,79%	100%	185,09%	100%
7	01	01	6.2.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Desa yang Dilaksanakan	100%	73%	100%	99,31%	99,31%	100%	272,31%	100%
7	01	01	6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang disusun								
7	01	01	6.2.01.6	Fasilitasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi	-	7 Desa	-	-	-	-	7 Desa	100%

				Pemilihan Kepala Desa	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa								
7	01	01	6.2.01.9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	100%	100%	100%	100%	100%	1 Dokumen	300%	100%
7	01	01	6.2.01.5	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen penetapan lokasi pembangunan Kawasan perdesaan	100%	-	100%	98%	100%	1 Dokumen	98%	100%
7	01	01		KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian konflik sosial	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01		Koordinasi Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertical diwilayah kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-

Dari Hasil Evaluasi diatas, diperoleh data bahwa terdapat 2 indikator program untuk tahun 2022, sedangkan jumlah indikator dari tahun 2019- 2022 sebanyak 7 indikator. Sesuai dengan Permendagri 86/2017 bahwapenilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dihitung menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam Tabel T-E.1

Rata-rata Capaian Kinerja pada tahun 2022 adalah :71,43 % kategori Sedang, dan Rata- Rata Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 adalah : 83,87% kategori : TINGGI.

Tabel T-E.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

	INTERVAL NILAI KINERJA	PREDIKAT KINERJA
1	< 50 %	SANGAT RENDAH
2	51 < 65 %	RENDAH
3	66 < 75 %	SEDANG
4	76 < 90 %	TINGGI
5	91 < 100 %	SANGAT TINGGI
6	> 100	MELAMPAUI

Rekapitulasi Capaian Kinerja pada Kecamatan Sukatani Tahun 2022 Triwulan 1 s/d Triwulan IV terhadap Capaian Kinerja RPJMD adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2022) Tahun yang dievaluasi (PARSIAL 4)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2022) Tahun yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Predikat Kinerja
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
3	4		5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	13 = (11/9 x 100)	14 = (12/10 x 100)	27
Kecamatan Sukatani					4,171,535,575		875,143,400		1,644,711,640		2,624,133,994		3,498,829,758		3,498,829,758	71.43	83.87	
Kecamatan					4,171,535,575		875,143,400		1,644,711,640		2,624,133,994		3,498,829,758		3,498,829,758	71.43	83.87	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					4,048,141,505		851,027,400		1,609,558,390		2,559,080,744		3,413,746,508		3,413,746,508		84.33	
	1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B		B		B		B		B		B		100.00		SANGAT TINGGI
	2	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	100.00		21,00		39,76		63,22		80,00		80,00		100.00		TINGGI
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		Kategori	Baik	39,300,290	Baik	3,600,000	Baik	8,700,000	Baik	14,300,000	Baik	26,530,000	Baik	26,530,000	100,00	67,51	TINGGI
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa		Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang	%	100.00	10,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	SANGAT RENDAH

dan Kelurahan		Dilaksanakan																
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	SANGAT RENDAH
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	100.00	52,692,960	0.00	4,800,000	9,87	5,200,000	55,98	29,500,000	80.00	37,300,000	80.00	37,300,000	100.00	70.79	SEDANG
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	100.00	21,400,820	51.00	15,716,000	51.00	21,253,250	51.00	21,253,250	51.00	21,253,250	51.00	21,253,250	100.00	99.31	SANGAT TINGGI

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukatani

Analisis Capaian kinerja Kecamatan Sukatani sampai dengan Tahun 2022 Triwulan I sampai dengan Triwulan IV nilai rata-rata pencapaiannya sebesar 71,43 persen dengan predikat kinerja Sedang, Capaian ini tentu saja belum sesuai target, dan perlu ditingkatkan lagi agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai. Adapun faktor penghambat maupun Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

a. Faktor Penghambat :

1. SDM pelaksana kegiatan masih kurang memadai baik dari kuantitas maupun kualitas/kompetensi;
2. Pagu anggaran masih belum optimal;
3. Waktu pelaksanaan kegiatan belum sesuai rencana;

b. Faktor Pendorong :

1. Pencapaian kinerja difokuskan pada indikator yang mendorong capaian program perangkat daerah;
2. Pagu anggaran difokuskan pada kegiatan yang mendorong capaian program;
3. Pandemi covid-19 sudah melandai, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat kembali normal;

Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SUKATANI
KABUPATEN PURWAKARTA

No	Indikator	SPM/Stand ar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1) TW 2	Tahun 2024 (thn n)	Tahun2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah			Opini : B	Opini: BB (200%)	Opini : BB	Opini : BB	Opini : B	-	Opini : BB	Opini : BB	
2	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran			100%	100%	100%	100%	83,87%	48,30%	-	-	
3	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat			Baik (93%)	Baik (93%)	Baik (94%)	Baik (94%)	Baik (82,64%)	-	-	-	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat			-	-	-	-	-	-	Baik	Baik	
5	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan			100%	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
6	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
7	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan			100%	100%	100%	100%	70,79%	6,62%	100%	100%	
8	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan			100%	100%	100%	100%	99,31%	52,43%	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Kecamatan Sukatani.

Isu Strategis dapat diukur berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta yang berkaitan dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Pada Kecamatan Sukatani diidentifikasi ada beberapa permasalahan yang dapat dijadikan dasar isu strategis, yang dapat menghambat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean governance* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang dihadapi Kecamatan Sukatani pada tahun 2022 antara lain:

1. Jumlah personil di kecamatan sangat kurang; jumlah personil yang ada di kecamatan idealnya 30-35 orang, yang ada sekarang 23 orang;
2. Kualitas SDM yang ada masih kurang dari standar ideal aparatur pelayanan publik, sehingga sulit untuk mencari personil yang kopentensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
3. Sarana dan prasarana kantor Kecamatan Sukatani masih kurang memadai, baik berupa tata ruang gedung dan peralatan penunjangnya;
4. Terbatasnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan, sedangkan kebutuhan operasional, pelayanan kepada masyarakat, dan kegiatan pembangunan memerlukan dana sangat besar;

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan sebagaimana ditetapkan dalam RT/RW Kabupaten Purwakarta yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut :

1. Mengajukan usulan penambahan personil dan usulan pengisian jabatan/rotasi/promosi serta setiap tahun diajukan kebutuhan pegawai, Kecamatan memanfaatkan personil yang ada untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, dengan bagi habis tugas dan pembebanan tanggung

- jawab secara personil, begitu juga untuk pengelolaan anggaran kecamatan;
2. Mengajukan usulan pembangunan bangunan fisik kantor agar ideal sebagai sarana melaksanakan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat serta mengajukan penunjang kegiatan pelaksanaan sehari hari seperti Notebook dan Komputer;
 3. Jumlah anggaran yang terbatas, maka kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan disaring sesuai dengan prioritas dan kemanfaatannya bagi aparatur kecamatan maupun masyarakat;

Berdasarkan hasil analisa terhadap isu strategis Kecamatan Sukatani dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik);
Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.
2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur;
Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Sukatani dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah daerah, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*;
3. Pengelolaan Keuangan dan Barang;
Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneur management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja

(*Performance Budget*). Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Isu Strategis dapat diukur berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta yang berkaitan dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pada Kecamatan Sukatani diidentifikasi ada beberapa permasalahan yang dapat dijadikan dasar isu strategis, yang dapat menghambat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang dihadapi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022 antara lain:

1. Unsur Perencanaan

- 1) Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan PD sehingga terjadi ketidakselarasan output, outcome yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah;
- 2) belum optimalnya pelibatan stakeholder nonpemerintah dalam mendukung proses perencanaan pembangunan;
- 3) Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal;
- 4) Banyaknya amanat pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan multisektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- 5) Belum optimalnya kerjasama pembangunan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;

- 6) Kurangnya ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
- 7) Penggunaan aplikasi SIPD perencanaan masih belum optimal dari segi fitur maupun SDM yang mengelolanya di masing-masing Perangkat Daerah;

2. Unsur Keuangan

- 1) Penggunaan aplikasi SIPD keuangan masih belum optimal dari segi fitur maupun SDM yang mengelolanya di masing-masing Perangkat Daerah;
- 2) Masih belum optimalnya pengelolaan administrasi Asset Daerah;
- 3) Belum optimalnya pendapatan asli daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, terutama saat terjadi pandemi covid-19 terjadi penurunan pendapatan daerah;

3. Unsur Kepegawaian

- 1) Masih rendahnya ASN struktural yang mengikuti kegiatan assessment;
- 2) Kurangnya alokasi formasi untuk pemenuhan kebutuhan pegawai;

4. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Masih rendahnya peningkatan SDM ASN melalui pendidikan dan pelatihan;

5. Unsur Kewilayahan

- 1) Belum optimalnya tata kelola administrasi pemerintahan di tingkat desa;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Kecamatan Sukatani disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis serta mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai amanat undang-undang 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi

penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

RKPD Kabupaten Purwakarta disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan undang-undang Nomor 25 tahun 2024 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta, perencanaan yang dilakukan oleh Lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Sukatani diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan. Dalam RKPD 2024 Kecamatan Sukatani mengusulkan 6 program dengan 14 kegiatan dan 34 subkegiatan dengan total anggaran Rp. 3.983.342.851,-.

Rancangan awal RKPD Kecamatan sukatani Tahun 2024 dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada tabel T-C. 31 berikut:

TABEL.T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2024 KEC. SUKATANI KAB.PURWAKARTA

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KEC. SUKATANI				3.983.342.851					3.983.342.851	
1.	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	3.881.427.939	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	3.881.427.939	
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	23.000.000,-	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	23.000.000,-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	3.277.380.771,-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	3.277.380.771,-	

	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	4.000.000,-	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	4.000.000,-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	25.000.000,-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	25.000.000,-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	109.137.168,-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	109.137.168,-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	65.000.000,-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	65.000.000,-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	287.910.000,-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	287.910.000,-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	90.000.000,-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	90.000.000,-	

2.	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	7.000.000,-	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	7.000.000,-	
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan	100 %	3.000.000,-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan	100 %	3.000.000,-	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang dilaksanakan	100 %	4.000.000,-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang dilaksanakan	100 %	4.000.000,-	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	100 %	10.500.000,-	PROGRAM Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	100 %	10.500.000,-	
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Indek Desa membangun	100 %	10.500.000,-	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Indek Desa membangun	100 %	10.500.000,-	
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Tingkat penyelesaian konflik sosial	100 %	8.500.000,-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Tingkat penyelesaian konflik sosial	100 %	8.500.000,-	

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Jumlah Koordinasi Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Disusun	100 %	8.500.000,-	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Jumlah Koordinasi Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Disusun	100 %	8.500.000,-	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	54.600.000,-	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	54.600.000,-	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Persentase Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	100 %	54.600.000,-	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Persentase Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	100 %	54.600.000,-	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	100 %	21.314.912,-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	100 %	21.314.912,-	
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Jumlah dokumen Fasilitasi, rekomendasi, koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa yang disusun		21.314.912,-	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Purwakarta Kec. Sukatani	Jumlah dokumen Fasilitasi, rekomendasi, koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa yang disusun	100 %	21.314.912,-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di wilayahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal Bottom Up yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Kabupaten Purwakarta. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan Top Down dari kunjungan kerja Bupati dan Reses DPRD. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem E-Planning yang diajukan ke Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Kecamatan Sukatani berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Usulan masyarakat yang masuk kedalam RKPD dan Renja Kecamatan Sukatani adalah usulan untuk Program Percepatan Infrastruktur Desa. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL T-C.32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	Perumahan dan kawasan permukiman	Desa Cianting Utara	Jumlah Perbaikan rumah tidak layak huni	21 unit rumah	
2	Pelayanan Kesehatan masyarakat	Desa Cianting Utara	Jumlah Pelayanan Kesehatan masyarakat	4 unit	
3	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Desa Cianting Utara	Jumlah Pengembangan UMKM	30 orang	
4	Pelatihan tenaga kerja	Desa Cianting Utara	Jumlah Pelatihan tenaga kerja	40 orang	
5	Perbaikan rumah tidak layak huni	Desa Cianting	Jumlah Perbaikan rumah tidak layak huni	20 unit rumah	
6	Perbaikan jalan kabupaten	Desa Cianting	Jumlah Perbaikan jalan kabupaten	1,6 Km	
7	Pengembangan UMKM	Desa Cianting	Jumlah Pengembangan UMKM	2 kelompok	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
8	Pembinaan Lembaga Kesenian Tradisional Masyarakat	Desa Cianting	Jumlah Pembinaan Lembaga Kesenian Tradisional Masyarakat	1 Kelembagaan	
9	Perbaikan jalan kabupaten	Desa Cibodas	Jumlah Perbaikan jalan kabupaten	1,5 Km	
10	Pengembangan UMKM	Desa Cibodas	Jumlah Pengembangan UMKM	1 kelompok	
11	Pembinaan Lembaga Kesenian Tradisional Masyarakat	Desa Cibodas	Jumlah Pembinaan Lembaga Kesenian Tradisional Masyarakat	1 Kelembagaan	
12	Perbaikan rumah tidak layak huni	Desa Cibodas	Jumlah Perbaikan rumah tidak layak huni	15 unit rumah	
13	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan pedesaan	Desa Pasirmunjul	Jumlah Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan pedesaan	3 Titik	
14	Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	Desa Pasirmunjul	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	1 Km	
15	Sosialisasi Germas/PHBS	Desa Pasirmunjul	Jumlah Sosialisasi Germas/PHBS	50 orang	
16	Perbaikan jalan lingkungan	Desa Pasirmunjul	Jumlah panjang jalan lingkungan yang akan diperbaiki	1,5 Km	
17	Pengembangan dan pembinaan keolahragaan	Desa Cilalawi	Jumlah Pengembangan dan pembinaan keolahragaan yang akan dilaksanakan	1 unit	
18	Pelayanan Kesehatan masyarakat	Desa Cilalawi	Jumlah pelayanan Kesehatan masyarakat yang akan disediakan	1 unit	
19	Bantuan pemberdayaan pembudidayaan ikan	Desa Cilalawi	Jumlah bantuan pemberdayaan dan pembudidayaan ikan yang akan dilaksanakan	30 orang	
20	Penyediaan Kelengkapan Jalan	Desa Cilalawi	Jumlah Penerangan jalan yang akan disediakan	12 Titik	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
21	Pelatihan tenaga kerja	Desa Cipicung	Jumlah orang yang akan mengikuti pelatihan	40 orang	
22	Bantuan pengadaan benih padi, Tanaman, Holtikultura,pupuk	Desa Cipicung	Jumlah Pengadaan benih padi ,Tanaman Holtikultura, pupuk yang di sediakan	2 Ton Padi 10 Ton PPK	
23	Perbaikan jalan kabupaten	Desa Cipicung	Jumlah panjang jalan kabupaten yang diperbaiki	3 Km	
24	Pengembangan UMKM	Desa Cipicung	Jumlah UMKM yang akan dibentuk	5 Kelompok	
25	Perbaikan jalan kabupaten	Desa Sukatani	Jumlah panjang jalan kabupaten yang akan diperbaiki	700 meter	
26	Penyediaan prasarana sarana umum,penunjang hunian(jalan lingkungan, drainase,TPT)	Desa Sukatani	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang akan disediakan	500 meter	
27	Pembinaan Lembaga Kesenian Tradisional Masyarakat	Desa Sukatani	Jumlah Lembaga kesenian Tradisional Masyarakat yang akan dibina	2 kelompok	
28	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Desa Sukajaya	Jumlah Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang akan dibangun	6 Posyandu	
29	Pengembangan UMKM	Desa Sukajaya	Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi UMKM yang akan dilaksanakan	10 orang	
30	Pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif	Desa Sukajaya	Jumlah orang dalam mengikuti pelatihan /bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif yang dilaksanakan	20 orang	
31	Perbaikan jalan kabupaten	Desa Sukajaya	Jumlah panjang jalan kabupaten yang akan diperbaiki	500 meter	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
32	Pelatihan, bimbingan tekhnis dan pendampingan ekonomi kratif	Desa Cijantung	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan, bimbingan tekhnis dan pendampingan ekonomi kratif	10 orang	
33	Pengembangan dan pembinaan keolahragaan	Desa Tajursindang	Jumlah Pengembangan dan pembinaan keolahragaan yang dilaksanakan	1 unit	
34	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis	Desa Tajursindang	Jumlah Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis yang dilaksanakan	500 meter	
35	Penyediaan prasarana sarana umum,penunjang hunian(jalan lingkungan, drainase,TPT)	Desa Tajursindang	Jumlah prasarana sarana umum,penunjang hunian(jalan lingkungan, drainase,TPT) yang disediakan	600 meter	
36	Pengembangan UMKM	Desa Tajursindang	Jumlah UMKM yang di kembangkan	2 kelompok	
37	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Desa Sindanglaya	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	20 orang	
38	Perbaikan jalan kabupaten	Desa Sindanglaya	Jumlah Panjang jalan yang diperbaiki kabupaten	2 Km	
39	Pemberdayaan masyrakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata	Desa Sindanglaya	Jumlah Kawasan pariwisata yang dikelola	1 lokasi	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
40	Pelatihan, bimbingan tekhnis dan pendampingan ekonomi kratif	Desa Sindanglaya	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan, bimbingan tekhnis dan pendampingan ekonomi kratif	40 orang x 1 kali 40 orang x 2 kali	
41	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Desa Panyindangan	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas Kesehatan	10 orang	
42	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata	Desa Panyindangan	Jumlah Kawasan pariwisata yang dikelola	1 lokasi	
43	Perbaikan rumah tidak layak huni	Desa Panyindangan	Jumlah rumah yang akan diperbaiki	10 unit	
44	Penyediaan prasarana sarana umum, penunjang hunian (jalan lingkungan, drainase, TPT)	Desa Panyindangan	Jumlah ketersediaan prasarana sarana umum, penunjang hunian (jalan lingkungan, drainase, TPT)	TPT 1,3 Km	
45	Pengembangan dan pembinaan keolahragaan	Desa Malangnengah	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang akan disediakan	1 unit	
46	Perbaikan jalan kabupaten	Desa Malangnengah	Jumlah Panjang jalan kabupaten yang akan diperbaiki	800 meter	
47	Penyediaan sarana Persampahan	Desa Malangnengah	Jumlah sarana tempat sampah yang akan disediakan	1 lokasi	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
49	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Desa Sukamaju	Jumlah Bangunan Posyandu yang akan disediakan	4 Pos	
50	Pelatihan kerja	Desa Cijantung	Jumlah orang yang akan mengikuti Pelatihan kerja	40 orang	
51	Perbaikan rumah tidak layak huni	Desa Cijantung	Jumlah rumah yang akan diperbaiki	10 unit rumah	
52	Pengembangan dan pembinaan keolahragaan	Desa Cijantung	Jumlah pembinaan olahraga yang akan dilaksanakan	1 unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SUKATANI

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 – 2024 :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Visi Pemerintah Pusat yaitu :

“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”

9 Misi Pemerintah Pusat yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa, dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

5 Arahan Presiden yakni :

1. **Pembangunan SDM**, yaitu Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. **Pembangunan Infrastruktur**, yaitu Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. **Penyederhanaan Regulasi**, yaitu Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. **Penyederhanaan Birokrasi**, yaitu Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. **Transformasi Ekonomi**, yaitu Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

7 Agenda Pembangunan Nasional yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Penjabaran dari 7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional tersebut diatas diantaranya yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a) pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b) distribusi pusat-pusat pertumbuhan(PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c) peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d) memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
- e) meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a) pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b) penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e) peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f) pengentasan kemiskinan; dan
- g) peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a) revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c) revolusi mental dalam sistem sosial.

Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a) menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b) peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c) pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d) rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e) mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a) peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- c) pembangunan rendah karbon.

7. **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a) reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b) meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- c) memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d) mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e) mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

3.2 **TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SUKATANI**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kabupaten Purwakarta serta merujuk kepada Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026, maka tujuan dan sasaran pembangunan pada Penyusunan Renja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 mengacu kepada Visi dan Misi RENSTRA Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, dimana Visi Pembangunan Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta yaitu:

VISI : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

Visi merupakan cara pandang kedepan, kearah mana Kecamatan Sukatani akan diarahkan dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif untuk mencapai tujuan, dalam mengantisipasi tantangan yang akan dihadapi guna mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sukatani. Untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta memiliki misi yaitu:

MISI: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

Guna mencapai visi dan misi tersebut diatas maka Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta menetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sukatani
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

VISI : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"			
MISI : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaran Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Reformasi Birokrasi
Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
		Meningkatkan Sinergitas dan Soliditas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa pengampu sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa untuk menunjang tujuan dan sasaran tersebut diatas, Kecamatan Sukatani mengusulkan 6 (Enam) program dan 14 (Empat belas) kegiatan serta 34 (Tiga puluh lima) subkegiatan untuk dilaksanakan pada Tahun 2024. Program, kegiatan dan Subkegiatan tersebut adalah :

No	Program	No	Kegiatan	No.	Subkegiatan
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja petrangkat daerah	1	Penyusunan Dokumen perencanaan daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Prubahan RKA- SKPD
				4	Koordinasi dan Penuyusunan DPA -SKPD
				5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		5	Administrasi Umum Perangkat daerah	13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
				14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				16	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan
				17	Penyelenggaraan rapat dan Konsultasi SKPD
		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18	Pengadaan Mebel
				19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		7	Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan daerah	20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik

				22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
				24	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
				25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya
				26	Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	27	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
		10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	28	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
III	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	29	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
				31	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa
VII	PROGRAM KOORDINASI KETERNTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14	Koordinasi Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	33	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				34	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Sukatani Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta

Kode		Urusan/Bidang Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Urusan Daerah	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
KECAMATAN SUKATANI							3.983.342.851				4.040.065.401
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Kec. Sukatani	BB	3.881.427.939	APBD		BB	3.934.804.743
	1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja petrangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	Kec. Sukatani	100%	23.000.000	APBD		100%	26.500.000
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	Kec. Sukatani	100%	3.277.380.771	APBD		100%	3.309.069.375

	3	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disusun	Kec. Sukatani	100%	4.000.000	APBD		100%	5.000.000
	4	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan	Kec. Sukatani	100%	25.000.000	APBD		100%	27.500.000
	5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengelolaan Penyediaan Administrasi Umum yang dilaksanakan	Kec. Sukatani	100%	109.137.168	APBD		100%	111.017.168
	6	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang yang di butuhkan	Kec. Sukatani	100%	65.000.000			100%	66.500.000
	7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Penvediaan Penuniang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dibutuhkan	Kec. Sukatani	100%	287.910.000	APBD		100%	294.218.200
	8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Kec. Sukatani	100%	90.000.000	APBD		100%	95.000.000
II		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kec. Sukatani	100%	7.000.000	APBD		100%	8.000.000

	1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penvelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	Kec. Sukatani	100%	3.000.000	APBD		100%	3.500.000
	2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penvelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Keria Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang dilaksanakan	Kec. Sukatani	100%	4.000.000	APBD		100%	4.500.000
III		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi dan Sosialisasi Pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kec. Sukatani	100%	54.600.000	APBD		100%	55.230.000
	1	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penvelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Sukatani	100%	54.600.000	APBD		100%	55.230.000
IV		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdavaan Masvarakat yang dilaksanakan	Kec. Sukatani	100%	10.500.000	APBD		100%	11.000.000
	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks Desa Membangun	Kec. Sukatani	100%	10.500.000	APBD		100%	11.000.000

V		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Kec. Sukatani	100%	8.500.000	APBD		100%	9.000.000
	1	Koordinasi Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	Kec. Sukatani	100%	8.500.000	APBD		100%	9.000.000
VI		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kegiatan Fasilitas. Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Desa yang Dilaksanakan	Kec. Sukatani	100%	21.314.912	APBD		100%	22.030.658
	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang disusun	Kec. Sukatani	100%	21.314.912	APBD		100%	22.030.658

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUKATANI

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sukatani Tahun 2024

Untuk mencapai sasaran sesuai indikator sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta menyusun Rencana kerja tahun 2024, Program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Sukatani tahun 2024 – 2026.

Rencana Kerja Pagu Indikatif tahun 2024 sebesar **Rp 3.983.342.851,-**, yang terdiri dari **Rp 3.271.380.771,-** untuk belanja Gaji dan Tunjangan ASN sedangkan **Rp. 711.962.080,-** untuk belanja Program dan Kegiatan, adapun rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sukatani Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

1. Kegiatan : **Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat daerah-** sebesar **Rp. 23.000.000,-** dengan indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun, dengan target terealisasi 100 %;
2. Kegiatan : **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah-**sebesar **Rp. 3.277.380.771,-** dengan indicator : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun, dengan target terealisasi 90 %;
3. Kegiatan : **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** – sebesar **Rp. 4.000.000,-** dengan indicator : Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disusun, dengan target terealisasi 100%.
4. Kegiatan : **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** – sebesar **Rp. 25.000.000,-** dengan indicator : Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan, dengan target terealisasi 100%

5. Kegiatan : **Administrasi Umum Perangkat daerah- sebesar Rp. 109.137.168,-** dengan indikator Jumlah Pengelolaan Penyediaan Admisnistrasi Umum yang disediakan, target terealisasi : 100 %;
6. Kegiatan : **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 65.000.000,-** dengan indicator : Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang yang dibutuhkan, dengan target terealisasi 100%.
7. Kegiatan : **Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan daerah-sebesar Rp. 287.910.000,-** dengan indikator Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dibutuhkan, target terealisasi 100 %;
8. Kegiatan : **Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah- sebesar Rp. 90.000.000,-** dengan indicator Jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan, target dapat terealisasi 100 %;

Total Rencana Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebesar Rp. 3.881.427.939,-

II. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan : **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan sebesar Rp. 3.000.000,-** dengan indicator jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan yang dilaksanakan, target dapat terealisasi 100%.
2. Kegiatan : **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan sebesar Rp. 4.000.000,-** dengan indicator : Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang dilaksanakan, dengan target terealisasi 100%.

Total Rencana Anggaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, sebesar Rp. 7.000.000,-.

III. Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, sebesar **Rp. 54.600.000,-** dengan indicator Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah, dengan target terealisasi 100%

Total Rencana Anggaran Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, sebesar Rp. 54.600.000,-.

IV. Program : Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan;

1. Kegiatan : **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa- sebesar Rp. 10.500.000,-** dengan indikator Indek Desa membangun, target terealisasi 100 %;

Total Rencana Keuangan Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, Rp. 10.500.000,-.

V. Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan : Koordinasi Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebesar **Rp. 8.500.000,-** dengan indicator Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang disusun, dengan target terealisasi 100%.

Total Rencana Anggaran Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebesar Rp. 8.500.000,-.

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

1. Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, anggaran yang disediakan sebesar Rp. 21.314.912,- dengan indicator Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang disusun, target terealisasi 100%.

Total Rencana Keuangan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp. 21.314.912,-

TABEL.4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN SUKATANI TAHUN 2024

KODE					PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2024				KETERANGAN		
									LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA			
1					2		3		4		5	6	7	8	9
					Kecamatan							3.983.342.851	APBD		
7	01	01			Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat	Kec.Sukatani	BB		3.881.427.939	APBD		
					Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja			Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	Kec.Sukatani	7		23.000.000	APBD		
7	01	01	2.01.01			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan daerah	Kec.Sukatani	1		3.000.000	APBD		
7	01	01	2.01.02			2	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec.Sukatani	1		3.000.000	APBD		
7	01	01	2.01.03			3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec.Sukatani	1		3.000.000	APBD		
7	01	01	2.01.04			4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Kec.Sukatani	1		3.000.000	APBD		

7	01	01	2.01.05	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec.Sukatani	1	3.000.000	APBD	
7	01	01	2.01.06	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Sukatani	1	3.000.000	APBD	
7	01	01	2.01.07	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Sukatani	1	5.000.000	APBD	
7	01	01	2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan			Kec.Sukatani	2	3.277.380.771	APBD	
7	01	01	2.02.01	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Sukatani	23	3.271.380.771	APBD	
7	01	01	2.02.03	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Sukatani	1	6.000.000	APBD	
7	01	01		Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah			Kec.Sukatani	1	4.000.000	APBD	
7	01	01		1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec.Sukatani	1	4.000.000	APBD	
7	01	01		Kegiatan : Adminitrasi Kepegawaian			Kec.Sukatani	2	25.000.000	APBD	
7	01	01		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kec.Sukatani	1	15.000.000	APBD	

7	01	01			2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kec.Sukatani	1	10.000.000	APBD	
7	01	01	2.06.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah			Jumlah Pengelolaan Penyediaan Admnistrasi Umum yang disediakan	Kec.Sukatani	5	109.137.168	APBD	
7	01	01	2.06.01		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec.Sukatani	1	15.000.000	APBD	
7	01	01	2.06.02		2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec.Sukatani	1	12.500.000	APBD	
7	01	01	2.06.03		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec.Sukatani	1	59.637.168	APBD	
7	01	01	2.06.04		4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec.Sukatani	1	10.000.000	APBD	
7	01	01	2.06.05		5	Penyelenggaraan rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Sukatani	1	12.000.000	APBD	
7	01	01	2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang yang di butuhkan	Kec.Sukatani	2	65.000.000	APBD	
7	01	01	2.07.01		1	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kec.Sukatani	16	35.000.000	APBD	
7	01	01	2.07.02		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Kec.Sukatani	4	30.000.000	APBD	
7	01	01	2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan daerah			Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dibutuhkan	Kec.Sukatani	3	287.910.000	APBD	
7	01	01	2.08.01		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Sukatani	12	10.500.000	APBD	
7	01	01	2.08.02		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec.Sukatani	12	42.000.000	APBD	

7	01	01	2.08.03		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec.Sukatani	12	235.410.000	APBD	
7	01	01	2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan	Kec.Sukatani	4	90.000.000	APBD	
7	01	01	2.09.02		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec.Sukatani	2	15.000.000	APBD	
7	01	01	2.09.03		2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec.Sukatani	12	12.000.000	APBD	
7	01	01	2.09.04		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec.Sukatani	3	50.000.000	APBD	
7	01	01	2.09.05		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec.Sukatani	2	13.000.000	APBD	
7	01	02		Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat	Kec.Sukatani	2	7.000.000	APBD	
7	01	02	2.01	Kegiatan :Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan	Kec.Sukatani	1	3.000.000	APBD	
7	01	02	2.01.02		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Sukatani	14	3.000.000	APBD	
7	01	01		Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			JumlahPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang dilaksanakan	Kec.Sukatani	1	4.000.000	APBD	

7	01	01			1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Sukatani	1	4.000.000	APBD	
7	01	01			Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			Kec.Sukatani	1	10.500.000	APBD	
7	01	01			Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Indek Desa membangun	Kec.Sukatani	1	10.500.000	APBD	
7	01	01			1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Sukatani	1	10.500.000	APBD	
7	01	01			Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Kec.Sukatani	1	8.500.000	APBD	
7	01	01			Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Koordinasi Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Disusun	Kec.Sukatani	2	8.500.000	APBD	
7	01	01			1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Sukatani	1	4.000.000	APBD	
7	01	01			2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.Sukatani	1	4.500.000	APBD	
7	01	05			Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kec.Sukatani	1	54.600.000	APBD	

7	01	05	2.01	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah			Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah	Kec.Sukatani	1	54.600.000	APBD	
7	01	05	2.01.01		1	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec.Sukatani	200	54.600.000	APBD	
7	01	06		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Kec.Sukatani	2	21.314.912	APBD	
7	01	06	2.01	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa			Jumlah dokumen Fasilitasi, rekomendasi, koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa yang disusun	Kec.Sukatani	2	21.314.912	APBD	
7	01	06	2.01.09		1	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec.Sukatani	1	15.495.500	APBD	
7	01	06	2.01.10		2	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kec.Sukatani	1	5.819.412	APBD	

TABEL.4.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, sasaran, Arah kebijakan dan Pagu Indikatif Kecamatan Sukatani
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

KODE	VISI RPJPD 2005- 2025	MISI RPJPD 2005- 2025	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH
									2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOTAL												
	Visi : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"											
I.		Misi : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat										
7.01.01			Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.881.427.939	3.934.804.743	4.010.030.930	Kecamatan Sukatani
7.01.02								Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	7.000.000	8.000.000	8.600.000	Kecamatan Sukatani
7.01.03								Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	10.500.000	11.000.000	11.000.000	Kecamatan Sukatani
7.01.04								Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	8.500.000	9.000.000	9.000.000	Kecamatan Sukatani
7.01.05								Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	54.600.000	55.230.000	55.330.000	Kecamatan Sukatani
7.01.06								Program : Pembinaan Dan Pengawasan	21.314.912	22.030.658	22.102.189	Kecamatan Sukatani

								Pemerintahan Desa				
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Penyusunan RENJA kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini diselaraskan dengan kebijakan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan harmonis serta berkelanjutan sesuai dengan dokumen perencanaan di atasnya.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, mengusung Tema Pembangunan yakni **“MENINGKATKAN PEMULIHAN EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH”**, dengan Prioritas Pembangunan Daerah yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
2. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Dokumen RENJA Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan pedoman bagi Kecamatan Sukatani dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diampu masing-masing, yang dijabarkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun perencanaan. Oleh karena itu guna menjamin pelaksanaan RENJA Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RENJA sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) mengacu kepada Renstra Kecamatan Sukatani;
2. RENJA menjadi pedoman bagi Kantor Kecamatan Sukatani dalam menyusun dan melaksanakan Program, Kegiatan dan Subgiatan Tahun 2024;
3. Perangkat Kecamatan Sukatani berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan yang terdapat dalam RENJA dengan berkolaborasi

dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta serta masyarakat dan stakeholder Kecamatan Sukatani ;

4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENJA secara berkala terhadap capaian kinerja Kecamatan ;
5. RENJA menjadi acuan dalam penyusunan laporan capaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan di Kecamatan Sukatani seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Camat kepada Bupati, Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan , dan penyusunan laporan lainnya.

Ketercapaian kinerja pembangunan daerah Kecamatan Sukatani dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sangat tergantung kepada peran serta dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat agar senantiasa bahu membahu dan terus bersinergi meningkatkan soliditas, harmonitas dan integritas dalam upaya membangun Kecamatan Kabupaten Purwakarta sehingga pelaksanaan pembangunan Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien dan tepat sasaran demi mewujudkan Masyarakat Purwakarta yang Mandiri dan Sejahtera.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukatani ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta dapat memenuhi harapan dan aspirasi semua pihak.

Purwakarta, 27 Juli 2023

CAMAT SUKATANI



HASANUDIN, S.Pd., KP
NIP. 19660304 199103 1 009

LEMBAR VERIFIKASI RENJA 2024

NAMA PD : KECAMATAN SUKATANI

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4
1	SISTEMATIKA : BAB I PENDAHULUAN BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP	✓	
2	BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	✓ ✓ ✓ ✓	

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4
3	BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	✓	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel T-C.29)		
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.30)	✓	
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	✓	
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel T-C.31)	✓	
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel T-C.32)	✓	
4	BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	✓	
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	✓	
	3.3 Program dan Kegiatan (Tabel T-C.33)	✓	
5	BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		
	Bab ini mengemukakan rencana kerja program kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam table matrik	✓	
6	BAB V PENUTUP		
	Berisikan uraian penutup	✓	
7	KESESUAIAN DENGAN RKPD 2024	✓	
	Memuat kesesuaian pagu anggaran, indikator kinerja, target program, kegiatan dan subkegiatan Renja dengan RKPD 2022		

1 Agustus 2023

CATATAN TINDAK LANJUT :

- Tolong pdajari PerBup no.55 tahun 2022, sederhanakan isi uraian Renja disesatkan dengan Pedoman, Perbaiki tampilan tabel, Rensi tata bahasa dan penulisan.
- Lampiran tdk perlu ada header footer, Uraian tlg SOTK tidak perlu dicantumkan di Renja karena sudah di konstur, agar Renja lebih tepat dan sesuai dengan Pedoman,
 - Tabel T.C 29 agar disesuaikan Tahun dan Brian datanya.

PURWAKARTA,

KASUBAG PROGRAM/PERENCANAAN

VERIFIKATOR,


(Karmila Harahap, SE.....)
NIP. 19820509 2006 2 007


(Vera Yulia Purki, SKM.....)
NIP. 19820709 200604 2 011

MENGETAHUI,
KEPALA BIDANG.....


(H. Hermawan.....)
NIP. 1966 0115 1950 10 1002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN SUKATANI

Jl. Raya Cicalawi KM 12 Sukatani – Purwakarta 41167

KEPUTUSAN CAMAT SUKATANI

Nomor : KU.03.01/12/SK.Renja/2022

Tentang

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA 2024

PADA KECAMATAN SUKATANI

CAMAT SUKATANI

- Menimbang :
- a. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja pada Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta sebagai Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dipandang perlu dibentuk tim penyusun rencana kerja;
 - b. Bahwa dengan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, guna tertib hukum dan tertib administrasi, maka pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2021, ditetapkan dengan Keputusan Camat Sukatani Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Djawa Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
 9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 92 Tahun 2023 Tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Keputusan Camat Sukatani Kabupaten Purwakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
- KEDUA** : Nama-nama dan susunan anggota Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KETIGA** : Uraian Tugas Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tertuang dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tim efektif dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 19 Desember 2022


CAMAT SUKATANI
HASANUDIN, S.Pd., KP
Nip 19660304 199103 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Purwakarta;
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta;
3. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : KU.03.01/12/SK.Renja/2022
Tanggal : 19 Desember 2022
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pada Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2024
PADA KECAMATAN SUKATANI

No	N A M A	JABATAN DALAM KEGIATAN	JABATAN DALAM STRUKTURAL
1	2	3	4
1.	HASANUDIN, S.Pd.,KP	Penanggungjawab	Camat
2.	BABANG SUBARNA, S.Pd.,M.Pd	Ketua	Sekcam
3.	KARMILA HARAHAHAP, SE	Sekretaris	Kasubag PKP
4.	ENJANG SOPYAN SORI, SKM	Anggota	Kasi PMD
5.	RIAN SUPRIANSYAH, SE	Anggota	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
6.	H. AA HADIAT, S.Pd	Anggota	Kasi Kesejahteraan Sosial
7.	APEP SOPIAN HARIRI, AMKL	Anggota	Kasi Tata Pemerintahan
8.	PUSPARINI, SE	Anggota	Kasi Ekonomi Pembangunan
9.	EULIS SITI AISAH, SE	Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
10.	PATMAPURI	Anggota	Bendahara

CAMAT SUKATANI



HASANUDIN, S.Pd., KP
Nip. 19660304 199103 1 009